

Volume 25, Nomor 2, Oktober 2020

P-ISSN: 1412 - 4009
E-ISSN: 2528 - 6722

JURNAL PENELITIAN Humaniora

- Representasi Makna Kesendirian pada Lirik Lagu "Ruang Sendiri" Karya Tulus
- Implikasi Pendidikan Luar Sekolah Anak melalui Paguyuban Seni Jemblung di Era Global
- Siger Sebagai Karakteristik Motif Batik Lampung Karya Andanan Batik Lampung di Desa Negeri Sakti Pesawaran Lampung
- Analisis Semiotik dalam Cerpen "Tak Ada yang Gila di Kota Ini"
- Seni dan Kewargaan

Jurnal Penelitian Humaniora	Volume 25	Nomor 2	Halaman 51 - 98	Yogyakarta Oktober 2020	P-ISSN: 1412 - 4009 E-ISSN: 2528 - 6722
-----------------------------	-----------	---------	-----------------	-------------------------	--

JURNAL PENELITIAN

Humaniora

DAFTAR ISI

	Halaman
Representasi Makna Kesendirian pada Lirik Lagu “Ruang Sendiri” Karya Tulus	
<i>Ghea Pradita Ratunis Sumja</i>	50 - 58
Implikasi Pendidikan Luar Sekolah Anak melalui Paguyuban Seni Jemblung di Era Global	
<i>Dedy Sartono</i>	59 - 66
Siger: Salah Satu Corak Khas Batik Andanan Lampung	
<i>Nyoman Weda Astawan</i>	67 - 77
Analisis Semiotik dalam Cerpen “Tak Ada yang Gila di Kota Ini”	
<i>Hani Latifah</i>	78 - 88
Seni dan Kewargaan	
<i>Kusen Alipah Hadi, GR Lono Lastoro Simatupang, dan St Sunardi</i>	89 - 97

SENI DAN KEWARGAAN

Kusen Alipah Hadi, GR Lono Lastoro Simatupang, dan St Sunardi

Program Studi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni rupa, Universitas Gadjah Mada

Email: kusenalipah@gmail.com

Abstrak

Pengadaan *Pasa Harau Art and Culture Festival* di Nagari Harau, Kabupaten Limapuluhkota, Sumatera Barat bertujuan untuk memberikan kontribusi pada tata kelola seni dan peluangnya mengambil bagian dalam proses demokratisasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan dimana para peneliti ikut terlibat langsung dalam upaya menumbuhkan kembali dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di Nagari Harau. *Pasa Harau Art and Culture Festival* merupakan suatu tindakan yang dipilih untuk diimplementasikan dalam penelitian ini, dimana pelaksanaan kegiatannya sudah disesuaikan dengan sistem/struktur organisasi yang baru. Struktur organisasi ini menyatu dengan Pemerintah Nagari Harau, institusi adat, dan bersifat fleksibel terdiri dari unsur-unsur Rapat Nagari, Dewan Festival, Direktur, Kurator, dan keuangan. Refleksi yang merupakan salah satu rangkaian dalam siklus penelitian tindakan mencatat dua hal penting yaitu 1) diperlukan suatu upaya yang lebih gigih untuk mendapatkan kepercayaan dan juga akses dari masyarakat setempat dalam upaya pelestarian nilai budaya di Nagari Harau dan 2) perlu adanya antisipasi terkait munculnya pelaku bisnis pariwisata yang hanya peduli pada keuntungan atau ajakan kolaborasi penuh resiko oleh birokrasi dalam pelaksanaan kegiatan *Pasa Harau Art and Culture Festival*.

Kata kunci: seni, tata kelola seni, dan kewargaan

ART AND CITIZENSHIP

Abstract

The *Pasa Harau Art and Culture Festival* in Nagari Harau, Limapuluhkota Regency, West Sumatra was conducted with the purpose to preserve the art values upheld in the community. It was also considered as an opportunity to take parts in the democratization process in Indonesia. This research implemented an action research approach where the researchers directly involved in the efforts to nurture and preserve the cultural values existed in Nagari Harau. *Pasa Harau Art and Culture Festival* was chosen to be implemented in this study in which the implementation of its activities has been adjusted to the new organizational system/structure. This organizational structure was integrated with the Nagari Harau Government, local culture institutions, and was executed flexibly, consisting of the elements of the Nagari Meeting, Festival Council, Director, Curator, and finance. In the *Reflection* cycle, which was a part of this action research cycles, two important points were noted: 1) a more persistent effort was needed to gain trust and access from the local community in the effort to preserve cultural values in Nagari Harau and 2) anticipation was needed regarding the emergence of business people who only cared for profits and risky collaboration with political parties/ bureaucracy in the implementation of the *Pasa Harau Art and Culture Festival*.

Keywords: art, art governance, citizenship.

PENDAHULUAN

Menjadi warga di zaman sekarang tidaklah mudah. Ia tidak bisa lagi diartikan sekadar berhak memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), suaranya dihitung dalam

Pemilihan Umum, atau melakukan sejumlah kewajiban. Kita memiliki beberapa contoh di mana kewargaan yang kita yakini tidak mampu mewartakan kenyataan-kenyataan saat ini. Sebagai contoh: bagaimana kelompok LGBT

medapatkan hujatan di hampir semua tempat, kelompok Ahmadiyah mendapat pengusiran di beberapa tempat, umat Protestan sering sekali mendapat kesulitan ketika mendirikan gereja, atau masyarakat Tionghoa-Dayak harus bersitegang setiap kali merayakan *Cap Go Meh* di Jln. Gajah Mada, Pontianak.

Di bawah konstitusi yang kita akui dan jalani bersama, banyak kelompok merasa menjadi warga 'kelas dua'. Kadang-kadang, warga lebih terasa sebagai 'hamba' atau 'kawula' yang bersifat pasif. Dengan kekuatan sendiri, sering sekali, warga harus menegaskan kembali kewargaannya melalui berbagai cara. Sebagai contoh, Ibu-ibu dari Kendeng, Jawa Tengah, harus melakukan *performance art* menanam kaki dalam bongkahan semen di depan Istana Merdeka pada 12 April 2016 sebagai pernyataan menolak pendirian pabrik semen.

Beaman (2016) dalam artikelnya *Citizenship as Cultural: Towards a Theory of Cultural Citizenship* mengatakan bahwa konsep kewargaan telah berkembang dalam beberapa abad terakhir. Kewargaan pada abad XVIII memberi hak-hak yang diperlukan bagi individu dan kesetaraannya di hadapan hukum. Sementara pada abad XIX, kewargaan merujuk pada kekuatan politik dan praktik politik yang melibatkan hak dan kewajiban sehubungan dengan komunitas politik tertentu. Sedangkan pada abad XX, kewargaan memberi penegasan kepada semua anggota masyarakat untuk berbagi hak-hak dasar dan kesejahteraan. Namun, ketiga konsep kewargaan tersebut mendapatkan kritik karena tidak mampu mengartikulasikan kewargaan sebagai status beroperasi dalam status 'kewargaan yang lain'.

Studinya tentang etnis minoritas, terutama Asia Amerika dan Latin, sebagai 'kewarganegaraan diam' di Amerika. Atau Muslim Asia Selatan Amerika yang harus melakukan 'Amerikanisasi' dengan menyukai dan berpartisipasi dalam olah raga bola-basket menunjukkan sejumlah penolakan kewargaan budaya (*cultural citizenship*), yang pada akhirnya memiliki implikasi terhadap keterlibatan politik dan

sosial kelompok marjinal. Oleh karena itu, diusulkan pembahasan konsep kewargaan yang tidak dilepaskan dari budayanya. Dalam hal ini, budaya yang dimaksud adalah norma, nilai, praktik, dan perilaku yang dipandang normatif. Dengan melakukan itu, kita dapat membongkar bagaimana konsep kewargaan tidak sepenuhnya cukup, terutama untuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Pada tahun 2012 UNESCO mempromosikan konsep kewargaan budaya melalui konsep hak partisipasi budaya yang mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk secara bebas berpartisipasi dalam kehidupan budaya dari komunitasnya, menikmati seni dan berbagi kemajuan sains dan manfaatnya. Hal ini juga sejalan dengan ayat 27 dari Deklarasi Hak Azasi Manusia (*United Nations Human Right*, 1948) dan nilai-nilai dalam pasal 32 UUD 45 yang menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Sejatinya, praktik-praktik eksperimen kewargaan budaya di Indonesia sudah banyak dilakukan, meskipun mereka tidak sepenuhnya menyebut demikian. Dalam ranah kesenian misalnya, Wijayanti menyebutnya sebagai kecenderungan seniman berkarya bersama warga atau sering disebut aktivisme (2016). Pada masa Orde Baru, kita bisa menyebut program 'Teater Pemberdayaan' yang dilakukan oleh PUSKAT di desa-desa di Pantai Selatan Jawa hingga tepian Danau Toba di Sumatera Utara. Atau 'guru gambar' Moelyono yang naik-turun-gunung membangkitkan kesadaran warga melalui keahliannya menggambar. Ong Hari Wahyu misalnya, menyelenggarakan perhelatan bersama warga yang berimplikasi perubahan citra desa. Sebab pada kenyataannya, 'kewargaan' adalah proses ganda dari membuat sendiri dan dibuat di dalam jaringan kekuasaan yang terhubung dengan negara.

Seni, seperti ini, menjadi salah satu metode yang dirasa efektif mengalami apa yang disebut sebagai warga budaya, daripada berharap negara mempromosikannya. *Paul Spencer*

dalam *Society and the Dance* mengatakan bahwa penggunaan seni sebagai basis gerakan sosial memang sangat memungkinkan, bahkan sangat produktif bagi usaha membangkitkan perlawanan kaum marjinal terhadap dominasi. Lebih lanjut Spencer dalam bukunya menulis bahwa seni (tari) memiliki fungsi-fungsi sosial, antara lain; tari sebagai organ kontrol sosial, model pendidikan sosial, dan sebagai gerak ritual. Ekspresi seni merupakan representasi dari superstruktur yang sangat dipengaruhi oleh basis ekonomi masyarakat. Oleh karena itu seni dapat menjadi elemen aktif bagi perubahan sosial.

Dalam masyarakat kita, kata 'seni' sudah mengalami pemiskinan arti. Seni sering hanya dipahami sebagai tari-tarian pembuka acara seminar serta peresmian gedung. Seni hanya salah satu pengisi waktu luang. Hal yang paling celaka, seni hanyalah monopoli kelas menengah ke atas, dan merupakan bagian gaya hidup modern. Oleh karena itu, kata 'seni' sering tidak menguntungkan sehubungan dengan eksperimentasi mengalami warga budaya. Kata 'festival' sebagai kata ganti 'seni' lebih menguntungkan dan mudah ditelusuri ekosistemnya di dalam masyarakat. Dalam hal ini, hajatan-hajatan warga bisa dipahami sebagai festival. *Sarullan* dan *Bersih Desa* di desa-desa di Pulau Jawa misalnya. Atau *Helat* dan *Gawai* di Pulau Sumatera. Atau *Begawai* di Pulau Kalimantan. Festival yang adalah hajatan warga memberi gambaran gamblang bahwa peristiwa seni berhimpit dengan sistem mata pencarian, adat, hingga praktek beragama. 'Festival' tidak bisa dipahami secara ketat seperti yang dijelaskan oleh Getz dan Page sebagai '*temporal phenomena and with planned event the event programme or schedule is generally planned in detail and well publicized in advice*' (2016).

Dengan keterbukaan, sekaligus kompleksitas festival, keterlibatan warga bisa melampaui peran-peran tradisionalnya. Pemuda-pemuda desa yang sering menyebabkan tekanan darah kedua orang tuanya naik, bisa memiliki peran penting sebagai tenaga penggerak utama festival. Seniman-seniman desa bisa menjadi idola

baru warga. Atau warga eks. TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang sudah pensiun, bisa menjadi *guide* bagi tamu. Sedangkan secara kelompok, festival warga berperan membangun identitas bersama, menaikkan posisi tawar, membuka peluang berjejaring, memproduksi pengetahuan, serta sebagai kendaraan untuk mendapatkan perhatian dalam pembangunan.

METODE

Pada tahun 2016, saya bersama Budhi Hermanto, Tri Sugiharto, Antok Suryaden, dan Dede Pramayoza mendapat kesempatan berkunjung ke *Nagari* Harau (satuan wilayah administratif di bawah kecamatan, mirip desa di Pulau Jawa), di Kabupaten Limapuluhkota, Sumatera Barat; menyaksikan dinding-dinding Sekolah Dasar yang berubah tembok, tidak memakai bahan yang bisa dilepas sehingga tidak bisa lagi dijadikan tempat pertunjukan di setiap perhelatan *Nagari*; mendengarkan cerita orang-orang tua bahwa 'dahulu' *Silek* (silat) selalu diajarkan di halaman Surau. Dan sekarang tidak lagi; bukan saja menyaksikan Talempong tidak dipukul lagi, bahkan alatnyapun tidak ada di *Nagari* Harau.

Tentu saja kami berlima tidak sampai hati membuat pertanyaan di mana *Sasaran*? Atau dimana *Galanggang* tempat berlatih *Silek*? *Sasaran* dan *Galanggang* merupakan bentuk panggung untuk kepentingan berbedabeda dalam tradisi Minangkabau). Apakah masih ada *Lelang Ayam Panggang* dalam pertunjukan *Randai*? *Lelang Ayam Panggang* merupakan metode mengumpulkan uang untuk pembiayaan pembangunan atau kepentingan bersama di tengah pertunjukan *Randai*.

Lebih-lebih, adakah *Ninik-mamak* dan *Bunda Kanduang* mengumpulkan kekayaan *nagari* untuk memberi beasiswa *anak-kemenakan*? *Ninik-mamak* adalah laki-lali yang dihormati dan dituakan (tidak berkorelasi dengan umur) dalam tradisi Minangkabau, *Bundo Kanduang* bisa berarti perempuan yang dituakan di dalam suatu kaum, merupakan ibu dari seorang anak, atau institusi tertinggi dalam tradisi Minangkabau, sedangkan *kemenakan* berarti anak dari saudara kandung. *Nagari* ini

seperti hidup dalam ketiadaan, berada di luar sejarah besar Sumatera Barat. Apakah yang harus kami perbuat? Bukankah jika diam, sebagaimana kata seorang seniman tradisi di Jawa, Basiyo, “*Wong cap opo*”?

Melalui Fitri Noveri, pemuda dari Nagari *Lubuak Batingkok*, nagari tetangga *Nagari Harau*, kami diperkenalkan kepada Da Un dan Da Cun. Bersama mereka, kami bahu-membahu melakukan eksperimentasi *Pasa Harau Art and Culture Festival* untuk perubahan di *Nagari Harau*.

Sebagaimana eksperimentasi, penyelenggaraan *Pasa Harau Art and Culture Festival* merupakan penelitian itu sendiri, dimana peneliti bertindak sebagai inisiator, terlibat dalam produksi estetika, serta melakukan pengorganisasian sebelum dan sesudah acara. Metodologi ini menguntungkan sebab dekat dengan data dan memudahkan verifikasi. Sebaliknya, karena tidak berjarak dengan data, menjadikan unsur-unsur personal sulit dilepaskan. Penulisan eksperimentasi ini adalah upaya peneliti mengambil jarak dengan peristiwa.

Menilik karakter *Pasa Harau Art and Culture Festival* yang dinamis, peneliti juga menggunakan metode prosesual, dimana penelitian tidak hanya mengkhususkan diri pada apakah subjek-subjek mengalami perubahan atau berlangsung terus, namun juga mencermati bagaimanakah mekanisme dan prosesnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasa Harau Art and Culture Festival diselenggarakan di *Nagari Harau*, salah satu *Nagari* di dalam cagar alam seluas 669 Hektar dengan tebing-tebing tinggi antara 100-500 M bernama Lembah Harau, Kabupaten Limapuluhkota, Sumatera Barat sejak tahun 2016. Dalam legenda masyarakat, ia dipercaya sebagai kawasan laut karena jenis bebatuan tebingnya identik dengan bebatuan yang ditemukan di dasar laut, yaitu batuan breksi. Dalam laman-laman pelaku wisata, Lembah ini sering dijuluki sebagai ‘Lembah Yosemite-nya Indonesia’ karena ingin dicitrakan memiliki keindahan seperti Taman Nasional

Yosemite yang terletak di Sierra Nevada, California.

Sebelum penyelenggaraan *Pasa Harau Art and Culture Festival*, *Nagari Harau*, pusat produksi gambir di Zaman Belanda, termasuk kategori desa di bawah garis kemiskinan berdasarkan data desa. Sebagaimana terbesar warganya mencari penghidupan di Jakarta, Pekanbaru, dan Malaysia. Dua Rumah Gadang yang tersisa tidak bisa dipakai lagi. Keduanya telah rusak berat. Alamnya yang indah dengan dinding-dinding granit memanjang, mengitari nagari lebih dari 3 KM tidak memberi keuntungan apapun. Jika Hari Raya atau Tahun Baru, kadang, warga *Nagari* mendapat limpahan rezeki dari para pelancong yang berdatangan. Namun, para pelancong hanya sebentar singgah. Mereka akan bergeser ke Jembatan Kelok Sembilan. Bukan karena alam *Nagari Harau* kurang indah, namun karena tidak tersedia fasilitas paling minim sekalipun, seperti toilet misalnya. Beberapa rumah menjadikan bagian bawah dapurnya sebagai tempat pembuangan segala air dan kotoran. Dibiarkan meresap begitu saja di bawah lantai kayu. Iwan Altajaru, seorang dosen di Institut Kesenian Jakarta yang berasal dari *Nagari Harau*, memberikan testimoni tentang kondisi desanya.

“Kondisi ini masih lebih bagus. Jika ingat beberapa tahun lalu, setiap minggu sore, kami sangat tertekan, harus jalan kaki ke arah Lubuak Limpato, menuju tempat tinggal. Jalanpun seperti kolam lele dan kubangan kerbau. Swadaya masyarakatlah yang menimbun jalan Akabarayun ke Harau.

Sementara para ayah membawa kayu bakar dan beras di belakang sepedanya untuk dijual, untuk bekal anaknya ke sekolah. Kalimat yang masih terngiang di telinga saya adalah “urang solek lah kolua” (orang yang suka berdandan itu sudah menampakkan diri). Hinaan yang sangat perih. Anak-anak tidak bisa membalas kalimat itu.

Pasa Harau Art and Culture Festival memilih ikon Payung *Pasa* atau Payung

Kaki Limo, berbentuk seperti payung pada umumnya, namun dengan ukuran lebih besar. Ukuran tiang atau pegayangannya kira-kira 2, 5 M, begitu juga diameter lingkaran peneduhnya. Pemilihan ikon ini tidak tanpa alasan, namun menunjuk pada ideologi dan estetika yang dipilih. *Pasa* berarti keramaian, dapat juga menunjuk bentuk pasar, area jual-beli tradisional yang menjadi urat nadi masyarakat Minangkabau. Dalam *pasa* dan keramaian inilah, kesenian-kesenian lama (tradisional) masyarakat Minangkabau dipertontonkan. Barangkali, mirip penampilan Ketoprak atau Wayang Kulit di acara Pasar Malam *Mauludan* di Pulau Jawa seperti kutipan sejarah *Randai* atau Teater *Randai* berikut ini:

Tahun 1932, diadakan pasar malam atau dikenal dengan Fency Fair di Payakumbuh. Disana disajikan berbagai macam kegiatan tradisi, tari, silat dan ada juga perjudian. Dari sekian banyak ragam acara, tampilah Tonil Klasik Minangkabau "Talapuik Layu nan Dandam" karya Datuik Paduko. Dari pertunjukan Tonil klasik tersebut, Jalut, Ilyas Datuk Ratih dan Datuk Paduko menciptakan kesenian baru yang bertolak dari seni tari Randai yang kemudian di kenal dengan sebutan Randai atau Teater Randai. (<https://randai-teater-rakyat-minangkabau>)

Pilihan ideologi *Pasa Harau Art and Culture Festival* membawa implikasi pada metode produksi kesenian yang akan tampil, yaitu Seniman Mukim, di mana seniman diharuskan berkolaborasi dalam membuat karya bersama warga dan seniman setempat. Metode produksi demikian memungkinkan warga *Nagari* Harau berinteraksi lebih lama dan mengalami sebagai pelaku, dalam hal ini sebagai penampil peristiwa festival. Daripada pengalamannya selama ini ketika tampil dalam festival-festival yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Kesenian-kesenian tradisi sering 'hadir' dalam 'ketidakhadiran', hadir sesaat sebelum pertunjukan, menggelar pertunjukan dengan format yang sudah ditentukan, kemudian pulang tanpa

mendapatkan kesan mendalam kecuali biaya pengganti transportasi yang kurang memadai.

Artistik utama *Pasa Harau Art and Culture Festival* yang hanya berupa *Sasaran*, tumpukan jerami melingkar, serta Payung *Pasa* sangat praktis. Perubahan ini dianggap bertolak belakang dengan pemahaman warga dalam menyelenggarakan festival. Penyelenggaraan festival selalu dianggap rumit, membutuhkan kecakapan-kecakapan yang hampir mustahil dikuasai oleh warga biasa, serta penampil-penampil yang membuat heboh media massa. Konsep dasar penggarapan artistik dan penyelenggaraan menjadi mungkin dilakukan dan bukan pekerjaan berat. Bahkan warga *Nagari* Harau sering bercanda dengan "Hanya satu tingkat di atas peringatan Hari Kemerdekaan RI".

Pasa Harau Art and Culture Festival I memilih tempat penyelenggaraan di lahan sawah kering sehabis panen, di *Jorong* (Satuan wilayah administratif di bawah *Nagari*, mirip *Dusun* di Pulau Jawa) Padang Torak, salah satu *Jorong* yang terletak di muka *nagari*, dengan dinding-dinding Lembah Harau paling berdekatan di antara wilayah yang lain, jembatan semi permanen tak terurus, atau bisa ditandai dengan habisnya jalanan beraspal. Setelahnya, penyelenggaraan festival tidak pernah menetap, namun berpindah-pindah dalam wilayah *Nagari* Harau untuk tujuan pemerataan keuntungan ekonomi dan perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Limapuluhkota. Sebab pada perkembangannya, pembangunan jalan seolah mengikuti di mana *Pasa Harau Art and Culture Festival* diselenggarakan.

Dalam pelaksanaannya, *Pasa Harau Art and Culture Festival* melakukan eksperimentasi dengan memperkenalkan struktur 'organisasi baru', mengadopsi organisasi yang telah digunakan oleh festival, *biennale*, atau perhelatan yang sudah mapan dengan modifikasi di sana-sini. Organisasi ini menyatu dengan Pemerintah *Nagari* Harau, institusi adat, dan bersifat cair. *Pertama*, rapat *Nagari* adalah institusi paling tinggi dalam organisasi festival. Bagian ini merupakan tempat perencanaan lima tahunan,

pencarian keterkaitan dengan kepentingan *nagari*, pertanggungjawaban pencapaian dan keuangan, serta menunjukkan kepemilikan atau produser festival. *Kedua*, Dewan Festival ditempatkan di bawah Rapat *Nagari*, dimaksudkan sebagai teman diskusi, memberi pertimbangan dan semesta pengetahuan lebih besar, dan benteng dari kemungkinan ikut campunya pihak luar. Dewan Festival berisi seniman-seniman yang dihormati dan tinggal di sekitaran *Nagari Harau*. *Ketiga*, Direktur, bertanggungjawab atas keseluruhan pelaksanaan Festival. Bersama Dewan Festival, Tetua *Nagari*, dan Wali *Nagari Harau*, direktur juga bertanggungjawab atas permasalahan pembiayaan. Kata ‘direktur’ sengaja dipilih, bukannya ketua atau nama-nama yang ‘lebih Minangkabau’ dikarenakan pihak swasta dan sponsor lebih ‘hormat’ dengan kata tersebut. *Keempat*, Kurator, bertugas menyusun acara, mempertimbangkan dramatika, serta memilih dan memberi alasan mengapa subjek-subjek tersebut disajikan dalam festival. *Kelima*, Keuangan, bertugas mengatur laju keluar-masuk keuangan, tidak pernah diberi nama, hanya keuangan saja.

Setelah empat kali pelaksanaan (Tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019). Tahun 2020 dibatalkan karena pandemi Covid-19), *Pasa Harau Art and Culture Festival* yang semula dianggap sebagai ide ‘mengada-ada’, belum tentu membuahkan hasil, sehingga hanya ‘ditonton’ dari kejauhan telah berhasil mengkativasi kewargaan di *Nagari Harau* melalui beberapa indikasi.

Pertama, keterlibatan *Ninik-mamak* dan *Bunda Kanduang*, sebuah institusi adat yang dihormati warga, dalam mengurai gejala internal festival, dengan mengundang Dede Pramayoza sebagai direktur festival pertama, Da Un sebagai Ketua Komunitas Harau, serta Da Cun sebagai salah satu penggerak awal festival di Surau *Nagari*, pada malam hari, sehabis menunaikan sholat Isya menandai *Pasa Harau Art and Culture Festival* bukan lagi sebagai perhelatan milik beberapa orang atau pemerintah *nagari*, melainkan merupakan perhelatan penting *Nagari Harau*. “Festival harus diteruskan. *Ninik-Mamak* dan *Bunda*

Kanduang akan memasang *Marawa Gadang*,” kata Da Un dan Da Cun sehabis pertemuan ketika itu. *Marawa Gadang* adalah Umbul-umbul milik Klan di dalam *Nagari*, hanya dikeluarkan untuk acara-acara penting, seperti pengangkatan *Datuk* atau ketua adat

Kedua, dalam setiap Rapat *Nagari*, institusi tertinggi dalam organisasi festival, selalu terjadi diskusi terbuka yang lebih terlihat sebagai konflik. Seperti ketika Wali *Nagari* (Pemimpin *Nagari*, seperti Kepala Desa di Pulau Jawa) yang mempertanyakan dominasi keterlibatan para inisiator dan harus segera diakhiri berdebat dengan sebagian warga yang memandangnya sebagai kewajaran. Akhirnya debat menghasilkan salah satu warga *nagari* dipilih sebagai direktur mulai *Pasa Harau Art and Culture Festival III*. Festival telah membangkitkan ruang (*sphere*) dimana proses nalar warga hadir secara leluasa, dimana berlangsung komunikasi yang memungkinkan warga membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif. Pelan-pelan, bahkan mungkin sedikit tertatih, *Pasa Harau Art and Culture Festival* menghadirkan ruang dimana semua warga memiliki peluang yang sama untuk mencapai konsensus yang adil dalam memperlakukan ‘lawan komunikasinya’.

Ketiga, kerja kolaborasi festival dengan anak-anak muda Kota Payakumbuh, Kotamadya yang berjarak 1,5 KM dari *Nagari Harau*, telah membuka berjejaring dengan admin-admin media sosial berpengaruh di Kota Payakumbuh, Pekanbaru, dan Padang, seperti: Instagram @sudutpayakumbuh yang memiliki lebih dari 154 ribu pengikut, @minangsedunia yang memiliki lebih dari 130 ribu pengikut, @iloveminang yang memiliki lebih dari 55 ribu pengikut, atau @angkotpadang yang memiliki lebih dari 89 ribu pengikut. Meskipun banyak yang menyangsikan keunggulan media sosial, terutama pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan dengan metode produksi pengetahuan dan akurasi berita, namun bagi *Pasa Harau Art and Culture Festival*, media sosial telah membuka akses produksi pengetahuan dan membentuk posisi tawar yang selama ini belum pernah dimiliki, seperti kata Mossberger yang mengatakan bahwa mereka

yang memiliki akses secara reguler kepada internet, ditambah dengan keterampilan ‘menemukan’, ‘memahami’, ‘mengevaluasi’, dan ‘menerapkannya’ akan memiliki akses ke manfaat sosial yang lebih besar. Kewarganegaraan digital adalah pendahulu dari partisipasi politik. Semakin banyak akses seseorang mendapatkan informasi dan layanan online, semakin besar kemungkinan partisipasinya (Mossberger, Tolbert, & Hamilton 2012).

Keempat, Pasa Harau Art and Culture Festival yang telah berubah menjadi identitas bersama, dijadikan kendaraan untuk bertindak lebih efektif, mengembangkan siasat-siasat untuk mendapatkan manfaat, seperti mendapatkan dana pembiayaan festival dan pembangunan infrastruktur *nagari*. Dalam kasus ini, keterlibatan pembiayaan oleh pemerintah tidak dipahami sebagai simbol kepemilikan. *Pasa Harau Art and Culture Festival* meletakkan kepemilikan pada inisiatif, kebebasan memilih bentuk dan estetika, serta keterlibatan warga.

Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Limapuluhkota pernah memberi tawaran melakukan pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia dengan melaksanakan 1000 *Arak Iriang*, yaitu arak-arakan *Niniak-Mamak, Bundo Kandung, Pucuk Adat* dengan mengenakan baju kebesaran masing-masing. Tawaran ini ditolak sebab tidak sesuai dengan ide kuratorial dan pilihan estetika, dimana ikon pariwisata Sumatera Barat ini, *Arak Iriang*, selalu dijadikan subjek perlombaan pemecahan rekor setiap tahunnya. *Pasa Harau Art and Culture Festival II* menawarkan subjek lain, yaitu minum *Kawa Daun* untuk para tamu yang jumlahnya bisa mencapai 7000 orang. Jika akhirnya jumlah tersebut mampu memecahkan rekor hanya merupakan akibat, bukan tujuan utama. *Kawa Daun* adalah salah satu cerita penderitaan petani di Sumatera barat ketika masa penjajahan. Setiap kepala keluarga diharuskan menanam minimal 3 hektar kopi dan dijual kepada pemuka masyarakat yang sudah menjadi kaki tangan penjahat sehingga tidak ada lagi biji kopi tersisa di rumah-rumah. Pungutan pajak

sebesar 20 % menyebabkan petani yang sudah menderita semakin bertambah menderita. Maka ketika mereka menginginkan nikmatnya rasa biji kopi hanya mungkin dibunuh dengan seduhan *Kawa Daun*, seduhan pucuk daun kopi yang sudah disangrai menyerupai teh. Biasanya warga menyajikannya *Kawa Daun* dengan batok kelapa, menambahkannya dengan gula Aren untuk mendapatkan paduan rasa kopi yang ringan, sepat, serta manis yang gurih.

Kelima, *Pasa Harau Art and Culture Festival* berhasil mendapatkan konteks urgensi mengapa festival perlu diselenggarakan, ditata, dan dikelola dengan memberi perhatian pada manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh warga dan *Nagari Harau*. Selepas *Pasa Harau Art and Culture Festival I*, Pemerintah *Nagari* bersama warga membuat peraturan bahwa pendirian penginapan hanya diperuntukkan bagi warga *Nagari Harau*, dimana saja tempat penginapan boleh didirikan untuk menjaga dinding-dinding lembah dan area persawahan agar tidak terhalang bangunan, serta memberi dukungan pembiayaan pada peningkatan ketrampilan serta menghidupkan lagi kesenian warga. Seperti gayung bersambut, rencana ini mendapat dukungan Kabupaten Limapuluhkota dengan semboyan ‘Harau Menuju Dunia’. Lembah Harau ditetapkan sebagai primadona pembangunan pariwisata.

Keenam, pada pelaksanaan festival ke-3, *Pasa Harau Art and Culture Festival* mengambil peran yang mungkin ‘dimainkannya’ sehubungan dengan menguatnya politik identitas menjelang hajatan politik Pemilihan Presiden. Berita media massa tentang menguatnya politik identitas, dalam hal ini di Sumatera Barat, memang ada benarnya, namun sepotong-sepotong dan lebih bertujuan mendapatkan ‘kehebohan’, daripada menghasilkan pemahaman musabab terjadinya permasalahan tersebut. Penggambaran media massa tentang Sumatera Barat lebih banyak dipenuhi isu politik dan kurang memberi porsi kebudayaan. *Pasa Harau Art and Culture Festival* memilih membuat budaya tanding dengan mengundang festival-festival sejenis dari daerah dan kebudayaan lain (Tao Silalahi

Art Festival, Festival Musik Rimbang Baling, Festival Bakcang, Festival Layang Lakbok, Festival Garam, serta Festival Nubun Tawa) untuk mendapatkan pengalaman ketubuhan, mengalami ‘potongan kecil Sumatera Barat’.

Ekperimentasi *Pasa Harau Art and Culture Festival* masih mencatat pekerjaan rumah. Peneliti berharap, catatan pekerjaan rumah ini dapat digunakan untuk memperbaiki diri dan menjadi sinyal kehati-hatian dalam eksperimentasi-eksperimentasi. *Pertama*, eksperimentasi *Pasa Harau Art and Culture Festival* diselenggarakan, bahkan, ketika warga *Nagari Harau* masih diliputi kecurigaan dan belum memberi restu ‘penuh’. Oleh karena itu, prakarsa eksperimentasi seni dan kewargaan yang berasal dari luar dirinya perlu, secepatnya, menemukan pintu masuk untuk mendapatkan kepercayaan, kaitan sosial, serta mendefinisikan soal-soal kepemilikan dan pertanggungjawaban keuangan. *Kedua*, eksperimentasi *Pasa Harau Art and Culture Festival* yang mengundang perhatian publik, apalagi diniatkan sebagai alat aktivasi kewargaan, telah menimbulkan konsekwensi-konsekwensi yang tidak bisa dihindari, seperti memunculnya pelaku bisnis pariwisata yang hanya peduli pada keuntungan atau ajakan kolaborasi penuh resiko oleh birokrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dan perhatian terhadap ketahanan sosial sebab *Nagari Harau* sudah memasuki *rimbo jo bancah dalam* (hutan belantara tak bertuan dengan rawa yang dalam).

SIMPULAN

Tawaran tata kelola pada penyelenggaraan *Pasa Harau Art and Culture Festival* memang berhasil mengaktivasi kesenian, seniman, serta tradisi di *Nagari Harau*. Meskipun penuh kerumitan saat memulai, tata kelola demikian telah menghadirkan peluang aktivasi kewargaan, memunculkan identitas bersama, serta mendefinisikan ulang relasi antara warga dan negara, dalam hal ini antara warga *Nagari Harau* dan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Sebagai contoh pada tahun 2019, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Limapuluhkota lebih

memilih membuat Festival Rendang sendiri, mengambil tempat berdekatan dengan tempat penyelenggaraan *Pasa Harau Art and Culture Festival IV* karena pilihan artistik. Tampilan festival yang cenderung sederhana, tanpa panggung pertunjukan dengan *background* tema acara atau foto pejabat, tanpa tenda tempat meletakkan kursi tetamu undangan penting, serta pemasangan *marawa* (umbul-umbul) di mana-mana bukan merupakan selera Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan keramaian. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Limapuluhkota tetap menyediakan tenda, kursi, *background digital printing*, serta baliho besar, juga menggunakan *digital printing*, di depan tempat penyelenggaraan.

Pada malam hari sebelum acara Festival Rendang, para pemuda *nagari* melakukan protes dengan mencabut baliho dan memindahkannya jauh dari tempat penyelenggaraan, “Ini acara kita, mereka tidak bisa mengatur-atur!” Keberanian demikian cukup mengherankan manakala menengok ke belakang, seturut cerita pada 5 hingga 10 tahun lalu, ketika warga harus memilih kandidat atau partai tertentu pada hajatan politik. Atau ketika pengurus *nagari* harus berhati-hatian dalam berkomunikasi dengan birokrasi, semata-mata, agar pengaspalan jalan dan sinyal telepon seluler sampai di *Nagari Harau*.

Tata kelola yang memaksa seni hanya masuk dalam format lomba, ‘dilestarikan’ dari kepunahan, atau sekedar atraksi wisata akan membuatnya kerdil dan tercabut dari akar. Tata kelola oleh negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI No.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sudah seharusnya memberi kesempatan kepada seni menjadi salah satu alat aktivasi kewargaan dan bagian penting proses demokratisasi di Indonesia. Sebab, sesungguhnya, demokrasi adalah sebuah proses yang dinamis, sesuatu yang menjadi (*becoming*) bukan jadi (*being*). Proses demokratisasi harus dipahami sebagai sesuatu yang *multilinear* dan kompleks, dibandingkan sebagai arus *unilinear* yang hanya bisa ditakar melalui konsolidasi suara dalam setiap kali hajatan politik atau berkenaan dengan posisi warga di hadapan hukum.

Ekperimentasi *Pasa Harau Art and Culture Festival* yang mempromosikan keterlibatan, pilihan ideologi dan artistik *Pasa*, serta metode produksi estetika kolaboratif merupakan tawaran tata kelola yang menggeser proses penciptaan estetika ke hulu, daripada menempatkannya di hilir perubahan sosial dan tidak berada di ruang kosong, melainkan dalam konteks sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Beaman, J. (2016). *Citizenship as cultural: Towards a theory of cultural citizenship*. *Sociology Compass*, 10(10), 849-857.

Getz, D., & Page, S. J. (2016). *Event studies: Theory, research, and policy for planned events* (3rd ed.). London: Routledge.

Mossberger, K., Tolbert, C. J., & Hamilton, A. (2012). Broadband adoption| measuring digital citizenship: Mobile access and broadband. *International Journal of Communication*, 6, 37.

Spencer, P. (1985). *Society and the dance*. New York: Cambridge University Press.

Wijayanti, V. (2016). Seni aktivisme dan masa depan seniman. *Brikolase*, 26 Mei. Diunduh dari <https://www.brikolase.com/2016/05/26/seni-aktivisme-dan-masa-depan-seniman/>